KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Risiko geopolitik, komisi XII sarankan genjot produksi energi
Tanggal : Senin, 26 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Risiko Geopolitik

Komisi XII Sarankan Genjot Produksi Energi

ANGGOTA Komisi XII DPR Ramson Siagian menyoroti ketergantungan terhadap impor minyak mentah yang masih berada pada level sangat tinggi. Kendati, pembangunan kilang minyak nasional melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) telah rampung.

"Kita punya konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, tapi masih impor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari," ujar Ramson dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Memang, lanjutnya, ada peningkatan *lifting* menjadi 605 ribu barel per hari, tapi tetap penurunan lifting atau produksi minyak bumi sangat signifikan sejak tahun 2005. Lifting di atas 1 juta barel per hari (bph) terakhir kali tercapai pada tahun 2005 (1,07 juta bph), sebelum akhirnya terus menurun drastis di tahun-tahun berikutnya.

Dia mengingatkan, adanya risiko geopolitik dapat mengancam ketahanan energi nasional. Karena ketergantungan impor dalam jumlah besar berisiko melumpuhkan pasokan energi apabila terjadi eskalasi geopolitik di kawasan tersebut. "Seperti potensi gangguan jalur distribusi di Selat Malaka," ucapnya.

Menurut Ramson, keberadaan kilang minyak berteknologi tinggi milik Pertamina tidak akan optimal jika pasokan minyak mentah dari dalam negeri tidak mencukupi. Oleh karena itu, peningkatan produksi minyak nasional menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai langkah strategis, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera mempercepat revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang telah berusia sekitar 25 tahun. Regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi terkini untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor sektor hulu migas.

Sementara, anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha mendukung langkah Kementerian ESDM menertibkan praktik pengeboran minyak bumi ilegal yang marak terjadi di sejumlah daerah. Sebab penertiban dan penataan yang dilakukan Pemerintah telah membawa dampak positif di lapangan.

"Para pelaku usaha yang sebelumnya melakukan pengeboran minyak ilegal kini mulai tertib dan kooperatif," kata Fasha dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Namun, Fasha mengingatkan pentingnya penguatan dasar hukum dalam kebijakan penataan illegal drilling. Utamanya terkait Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 mengatur tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Secara hierarki peraturan, posisi peraturan menteri masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan undang-undang.

"Jangan sampai dasar hukum ini terlalu lemah dan menimbulkan persoalan di kemudian hari, apalagi pasca pergantian kepemimpinan," tegas politikus Nasdem ini.

Dia mendorong Pemerintah mempertimbangkan regulasi yang lebih kuat, seperti Keputusan Presiden (Keppres), sembari menunggu pengesahan undang-undang yang tengah dibahas DPR. Aturan tersebut perlu mengakomodasi pemanfaatan aktivitas pengeboran oleh masyarakat agar memiliki kepastian hukum.

Fasha juga meminta para pelaku pengeboran ilegal yang kini telah dibina dan ditertibkan turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah. Namun, proses pembinaan harus dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, Fasha menyinggung pekerjaan rumah Pemerintah terkait pertambangan tanpa izin (PETI) yang dinilainya lebih kompleks. Sebab tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial dan korban jiwa. "Tinggal PETI ini yang harus menjadi perhatian serius ke depan," kata dia. ■ TIF